

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1.1.1. Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang

Berdasarkan dari hasil penelitian, implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Didukung oleh beberapa indikator yang telah dikategorikan baik yaitu **Ketepatan kebijakan**, yang terbukti relevan dengan kebutuhan daerah, membuka peluang lebih luas bagi UMKM lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. **Ketepatan lingkungan** didukung oleh sinergi antara lingkungan internal dan eksternal, seperti OPD, LPSE, dan penyedia barang/jasa, serta ada dukungan dari pimpinan daerah. Adapun indikator yang masih ditemukan beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan yaitu **Ketepatan pelaksana** masih terkendala oleh keterbatasan personel, dengan tingkat keterpenuhan yang hanya mencapai 60% serta belum meratanya kualifikasi di OPD. **Ketepatan target** menghadapi hambatan karena banyak penyedia dari UMKM masih kesulitan beradaptasi dengan sistem e-katalog akibat keterbatasan teknologi dan pemahaman. Selain itu, **ketepatan proses** juga masih perlu diperbaiki, terutama karena belum adanya SOP lokal serta keterbatasan kesiapan teknologi dan keterampilan penyedia yang menjadi kendala utama.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang dikategorikan belum optimal, karena kebijakan tersebut belum tepat pelaksana, tepat terget, dan tepat proses.

1.1.2.Faktor Pendorong dan Penghambat implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang

Implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang telah menunjukkan perkembangan yang cukup. Faktor yang mendorong keberhasilan implementasi diantaranya adalah **Disposisi**, yang ditandai dengan komitmen dan sikap positif dari pelaksana yang memberikan dukungan implementasi kebijakan. Adapun beberapa faktor yang masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, antara lain: **Komunikasi** dikategorikan belum optimal karena kurangnya intensitas komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta ketiadaan forum khusus bagi penyedia baru. **Sumber Daya** juga menjadi kendala utama, terutama terkait keterbatasan SDM dalam Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ), alokasi anggaran yang terbatas, serta infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, **Struktur Birokrasi** juga menghadapi hambatan, terutama dalam perubahan pola pikir pelaksana dan penyedia, kurangnya sanksi tegas, serta kendala adaptasi yang masih menghambat efektivitas implementasi.

1.2. Saran

Adapun saran yang diberikan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1.2.1. Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang

1.2.1.1. Ketepatan Pelaksana

Pemerintah daerah perlu meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi Intensif bagi pelaksana kebijakan untuk memastikan seluruh personel memiliki kompetensi yang memadai.

1.2.1.2. Ketepatan Target

Pendampingan rutin dan pelatihan kepada pelaku UMKM perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem e-katalog sehingga dapat mengoperasikan platform secara mandiri dengan baik.

1.2.1.3. Ketepatan Proses

Pemerintah Kabupaten Semarang perlu segera menyusun SOP lokal yang spesifik terkait implementasi kebijakan e-katalog untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Perlu dilakukan penyederhanaan sistem e-katalog agar lebih ramah pengguna dan mudah dipahami penyedia, khususnya UMKM.

1.2.2.Faktor Pendorong dan Penghambat implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang

1.2.2.1. Komunikasi

1. UKPBJ dan LPSE Kabupaten Semarang perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan bimbingan teknis terutama bagi UMKM lokal guna memastikan pemahaman yang baik terhadap sistem e-katalog.
2. UKPBJ dan LPSE Kabupaten Semarang perlu membentuk forum komunikasi berbasis aplikasi seperti WhatsApp yang melibatkan penyedia barang/jasa sebagai sarana diskusi dan penyelesaian kendala.

1.2.2.2.Sumber Daya

Meningkatkan program pelatihan bimtek bagi personel dan penyedia untuk memastikan seluruh sumber daya pelaksana memiliki kompetensi yang dapat mendorong optimalisasi kebijakan. Keterbatasan dana dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau instansi lain untuk mendukung dan memaksimalkan anggaran. Keterbatasan infrastruktur dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang sudah tersedia, lakukan perawatan berkala agar infrastruktur tetap berfungsi optimal.

1.2.2.3.Struktur Birokrasi

Pemerintah daerah perlu menetapkan mekanisme sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang tidak mematuhi kebijakan penggunaan e-katalog guna mendorong kepatuhan dan konsistensi dalam implementasi.